

FENOMENA CANCEL CULTURE DI PLATFORM "X": PENGHAKIMAN PUBLIK DALAM RUANG DIGITAL

Ninda Nurul Fadhillah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia; nindafad123@gmail.com

Abstract

Keywords:

Cancel Culture, Media
Evolution, Public
Sphere

The cancel culture phenomenon on the "X" platform is a form of public judgment in the digital space, where individuals or groups are boycotted because they are deemed to have violated social norms. This research uses a qualitative approach with critical discourse analysis to understand how cancel culture develops on this platform and its impact on free speech and social structures. Data was collected through tweet scraping and literature study, with a focus on the use of retweets, hashtags and comments as tools for forming collective narratives. Research results show that cancel culture often has psychological, social and professional impacts on its targets, including isolation, loss of reputation and threats to mental health. Meanwhile, this phenomenon also creates fragmentation and echo chambers, which strengthen the majority view but exclude the minority perspective. Using Habermas's Public Sphere Theory approach, this research reveals that the cancel culture phenomenon limits the freedom of rational and inclusive dialogue, turning the "X" platform into an arena for mass judgment that often ignores ethical principles. Although cancel culture can be used to demand social justice, this practice often produces greater negative impacts, such as polarization and restrictions on open discussion. This research emphasizes the need for in-depth evaluation of digital social control mechanisms to create healthier and more inclusive public spaces.

Abstrak

Kata kunci:

Cancel Culture,
Evolusi Media, Public
Sphere

Fenomena cancel culture di platform "X" merupakan bentuk penghakiman publik di ruang digital, di mana individu atau kelompok diboikot karena dianggap melanggar norma sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis untuk memahami bagaimana cancel culture berkembang di platform ini dan dampaknya terhadap kebebasan berbicara serta struktur sosial. Data dikumpulkan melalui scraping tweet dan studi literatur, dengan fokus pada penggunaan retweet, hashtag, serta komentar sebagai alat pembentukan narasi kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cancel culture sering menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan profesional bagi targetnya, termasuk isolasi, kehilangan reputasi, dan ancaman terhadap kesehatan mental. Sementara itu, fenomena ini juga menciptakan fragmentasi dan echo chamber, yang memperkuat pandangan mayoritas tetapi mengesampingkan perspektif minoritas. Dengan pendekatan Teori Ruang Publik Habermas, penelitian ini mengungkap bahwa fenomena cancel culture membatasi kebebasan berdialog secara rasional dan inklusif, mengubah platform "X" menjadi arena penghakiman massal yang sering kali mengabaikan prinsip-prinsip etika. Walaupun cancel culture dapat digunakan untuk menuntut keadilan sosial, praktik ini sering kali menghasilkan dampak negatif yang lebih besar, seperti polarisasi dan pembatasan diskusi terbuka. Penelitian ini menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap mekanisme kontrol sosial digital untuk menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan inklusif.

Corresponding Author: Ninda Nurul Fadhillah

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia; nindafad123@gmail.com

PENDAHULUAN

Fenomena *cancel culture* telah menjadi subjek utama diskusi global, terutama dalam konteks media sosial seperti platform "X" (Islahuddyn, 2023). Istilah "*cancel*" sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya "membatalkan", sedangkan "*culture*" berarti budaya, jadi *cancel culture* adalah budaya memboikot seseorang yang dianggap bermasalah secara massal. Tetapi dalam konteks modern, istilah ini digunakan untuk mengindikasikan proses penghapusan atau pengucilan seseorang atau sesuatu dari lingkungan sosial online (Lola Edria et al. 2023). Sejarah awal fenomena *cancel culture* terkait erat dengan gerakan sosial besar seperti #MeToo dan #BlackLivesMatter. Gerakan ini mencetuskan debat tentang keadilan dan hak-hak manusia, terutama dalam konteks pelecehan seksual dan hak-hak etnis minoritas (Yanuar et al. 2023). Namun, seiring waktu, istilah ini semakin luas digunakan tidak hanya untuk kasus-kasus ekstrem saja, tapi juga untuk situasi harian di dunia maya.

Teknologi, termasuk media sosial, telah menjadi alat kuat dalam pengendalian sosial (Yanuar et al. 2023). Platform "X", salah satu platform media sosial yang paling aktif, menjadi tempat ideal bagi fenomena *cancel culture*. Platform ini memfasilitasi komunikasi langsung dan cepat, sehingga memberikan wewenang kepada pengguna untuk meletakkan opini mereka tanpa batasan tradisional (Islahuddyn, 2023). Hal ini meningkatkan potensial bagi pengguna untuk melakukan penghapusan atau kritik terhadap individu atau organisasi tertentu (Roseline et al. 2023). Melalui hashtag dan tagging, pengguna dapat dengan mudah menyebarluaskan pesan dan kritik negatif, yang dapat sangat efektif dalam mengubah citra publik seseorang (Roseline et al. 2023). Ini menunjukkan betapa signifikan teknologi dalam memodernisasikan mekanisme kontrol sosial.

Salah satu implikasi fenomena *cancel culture* adalah restrukturisasi kebebasan berbicara di media sosial (Islahuddyn, 2023). Meskipun teoritisnya kebebasan berbicara dipromosikan, prakteknya sering kali dibatasi oleh tekanan sosial dan rasa takut akan balasan negatif dari komunitas online. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah kita benar-benar memiliki kebebasan berbicara di zaman digital (Lola Edria et al. 2023).

Fenomena *cancel culture* juga terkait dengan fragmentasi dan pembentukan *echo chamber* (Islahuddyn, 2023). "*Echo Chamber*" dapat diartikan sebagai ruang bergema, maksudnya adalah lingkungan di mana seseorang hanya menemukan informasi atau pendapat yang mencerminkan dan memperkuat pendapat mereka sendiri. Ruang bergema ini dapat ditemukan baik di dunia nyata maupun dunia maya (GCFLearn 2019). Ketika individu bergabung dalam grup-grup yang memiliki pandangan serupa, maka dialog yang inklusif menjadi sulit dicapai. Hal ini menghasilkan isolasi intelektual dan kurangnya diversitas perspektif, yang pada gilirannya dapat mengancam stabilitas demokratisasi dan perkembangan sosial yang seimbang (Yanuar et al. 2023).

Fenomena *cancel culture* di Platform "X" merupakan refleksi kompleksitas interaksi manusia dalam ruang digital (Roseline et al. 2023). Sementara fenomena ini dapat digunakan sebagai sarana advokasi dan perlindungan hak-hak. Oleh karena itu

dalam artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana fenomena *cancel culture* di media sosial platform “X”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis untuk mengkaji fenomena *cancel culture* di platform “X” sebagai bentuk penghakiman publik dalam ruang digital. Data dikumpulkan melalui teknik scraping terhadap tweet yang terkait dengan kasus *cancel culture* pada figur publik tertentu. Pemilihan kasus dilakukan secara purposif berdasarkan besarnya perhatian publik, jumlah retweet, dan penggunaan hashtag terkait.

Penelitian ini juga memanfaatkan studi literatur dalam penelitian terkait *cancel culture*. Studi literatur ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan tentang masalah khususnya mengenai *cancel culture*, serta mengkaji penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan *cancel culture*. Data yang diperoleh dari scraping dan studi literatur akan dianalisis menggunakan teori ruang publik dari Jurgen Habermas. Analisis ini fokus pada bagaimana kekuatan pengguna platform “X” dalam membentuk narasi kolektif, pengaruh opini mayoritas, serta dampak sosial yang dihasilkan dari tindakan *cancel culture*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evolusi Media Sosial

Awalnya media sosial lebih banyak digunakan sebagai sarana hiburan dan penyebaran informasi sederhana. Pada awal kemunculannya, platform media sosial berbasis teks, di mana pengguna hanya bisa mengirim dan menerima pesan dalam bentuk teks. Namun, seiring perkembangan teknologi, media sosial berevolusi menjadi lebih interaktif dan visual. Fitur-fitur seperti unggahan foto dan video mulai diperkenalkan, diikuti dengan adanya kolom komentar dengan tujuan agar pengguna saling berinteraksi secara langsung.

Perubahan ini membawa dampak besar pada pola komunikasi di media sosial. Dari yang awalnya hanya sebagai media berbagi informasi satu arah, kini media sosial menjadi ruang yang lebih dinamis di mana setiap orang bisa berpartisipasi dan menyuarakan pendapat. Inilah yang disebut sebagai evolusi media sosial, di mana fungsinya telah berkembang jauh dari sekadar sarana hiburan menjadi ruang publik digital. Di ruang ini, orang-orang bebas menyampaikan pandangan, berpartisipasi dalam diskusi sosial, dan bahkan berkontribusi dalam pembentukan opini publik secara global.

Evolusi media sosial, khususnya platform “X”, telah memfasilitasi terbentuknya fenomena baru seperti *cancel culture*. Fenomena *cancel culture* adalah peristiwa dimana orang yang mempunyai pengaruh tinggi di dalam masyarakat membuat suatu pernyataan yang menyinggung kelompok tertentu di media sosial. Individu yang biasanya menjadi target *cancel culture* adalah politisi, aktor/ aktris, atau tokoh masyarakat, *cancel culture* juga bisa berdampak kepada perusahaan jasa atau barang

(Roseline et al. 2023). Hal tersebut dapat terjadi bila orang tersebut mengatakan pernyataan di media sosial yang dapat menyinggung orang banyak.

Cancel Culture

Cancel culture adalah sebuah gerakan yang terorganisir dalam menghentikan dukungan terhadap seorang publik figur atau orang terkenal setelah melakukan atau mengatakan hal-hal yang ofensif atau menyinggung kelompok tertentu (Roseline et al. 2023). Dikutip berdasarkan pernyataan yang disampaikan pada website dictionary.com, *cancel culture* diartikan sebagai fenomena atau praktek penolakan, pemboikotan, atau penghentian dukungan di depan umum untuk orang atau kelompok tertentu karena pandangan atau tindakan mereka yang tidak dapat diterima secara sosial atau moral. *Cancel culture* dapat merusak karir, tetapi juga dapat membuat publik figur berpikir dua kali sebelum memposting komentar kontroversial. Pada awalnya, media sosial hanya digunakan untuk berbagi informasi atau hiburan, namun dengan berkembangnya fitur interaktif seperti komentar, retweet, dan tagar platform “X” telah berubah menjadi ruang publik virtual yang memungkinkan percakapan dan diskusi luas. Perubahan ini memberi pengguna kesempatan untuk menyuarakan pendapat dalam banyak kasus, berpartisipasi dalam gerakan sosial yang bertujuan untuk menegakkan keadilan.

Terdapat lima alasan mengapa seseorang melakukan tindakan *cancel culture* (Henderson 2019):

1. *Cancel culture* meningkatkan status sosial pelaku
2. *Cancel culture* mengurangi status sosial korban
3. *Cancel culture* memperkuat ikatan sosial terhadap masyarakat
4. *Cancel culture* memaksa korban untuk speak up atau mengungkapkan diri
5. *Cancel culture* menghasilkan kesenangan bagi pelaku

Dengan sifat platform “X” yang dapat membuat percakapan cepat dan luas, publik sering kali bersatu untuk mengkritik atau bahkan memboikot individu atau kelompok yang dianggap melanggar norma sosial. Aksi ini terjadi ketika sekelompok pengguna merasa bahwa seseorang atau entitas telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dibiarkan, dan dengan dukungan retweet dan komentar, penghakiman publik dapat menyebar dengan cepat. Hal ini dapat dikatakan bahwa seorang komunikator beserta audiensnya sangat menggunakan dan memanfaatkan media baru (Waani and Wempi 2021). *Cancel culture* ini menjadi bagian dari dinamika baru yang lahir dari evolusi media sosial, di mana pengaruh pengguna di ruang publik digital dapat sangat kuat.

Dalam konteks *cancel culture*, platform “X” bukan lagi sekadar platform berbagi informasi, melainkan medan penghakiman sosial di mana reputasi seseorang bisa jatuh dalam hitungan jam. Ruang publik yang terbentuk di media sosial kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk berbagi pendapat, tetapi juga untuk menegakkan standar sosial, meskipun sering kali dengan konsekuensi yang berat. Hal ini menandakan bahwa evolusi media sosial telah menciptakan fenomena baru yang tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga cara masyarakat memberikan penilaian dan sanksi sosial dalam skala global.

Teori Public Sphere Jurgen Habermas Dalam Fenomena *Cancel Culture*

Konsep Teori Public Sphere milik Jurgen Habermas menekankan pentingnya ruang publik sebagai tempat dimana masyarakat bebas berekspresi dan berdiskusi. *Cancel culture*, yang sering diasosiasikan dengan praktik sanksi sosial online, telah meregangkan batas-batas kebebasan berbicara individu. Fenomena ini seringkali terjadi di platform “X”, seseorang atau kelompok dikritik atau dikucilkan oleh publik karena dianggap melanggar norma sosial. Platform “X” menjadi arena utama bagi pembentukan opini publik dan pengorganisasian kampanye *cancelling* (Supriadi 2017).

Interaksi online di platform “X” sering kali superfisial dan kurang rasional dibandingkan diskursus *offline*. *Abusive speech*, *ad hominem attacks*, dan *statement-statement* yang tidak didukung fakta menjadi dominan, membuat ruang publik digital semakin eksklusif dan tidak ramah bagi mereka yang ingin berdebat secara rasional (Muhammad Alzaki Tristi 2023).

Teori public sphere Habermas juga menyoroti status orang yang tidak boleh dipertanyakan dalam ruang publik ideal. Namun, fenomena *cancel culture* sering kali melupakan prinsip-prinsip etika ini, karena individu-individu yang ditunjukkan sebagai 'berdosa' sering kali tidak memberikan kesempatan untuk klarifikasi tuduhan-tuduhan yang dilemparkan. Hal ini meningkatkan potensi salah tangkap dan kerugian hak-hak dasar individu (Supriadi 2017).

Baru-baru ini, owner Daviena Skincare menjadi sorotan karena tuduhan overclaim terhadap produknya, terutama produk seperti *body lotion* retinol. Seorang dokter yang dikenal sebagai Dokter Detektif mempublikasikan hasil uji laboratorium yang menunjukkan bahwa kandungan produk tersebut tidak sesuai dengan klaim yang dibuat. Meski banyak orang menuntut klarifikasi, pemilik Daviena, Melvina Husyanti, tidak meminta maaf, tetapi malah merespons dengan sindiran terhadap pengkritik, yang memperburuk situasi. Fenomena ini menimbulkan banyak perdebatan di media sosial. Berdasarkan kasus ini, maka dapat dilihat bahwa ruang publik ideal seharusnya dapat menerapkan diskusi terbuka dan rasional terkait produk-produk konsumen, termasuk skincare. Namun, dalam kasus ini, ketika pemilik Daviena disorot atas klaim-klaim yang dianggap tidak benar, alih-alih menjawab secara terbuka, ia justru menyindir kritik. Hal ini mencerminkan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam diskusi terbuka yang setara, yang berlawanan dengan konsep ruang publik Habermas, di mana klaim harus bisa dipertanyakan dan didiskusikan.

Baru-baru ini, media sosial, khususnya di platform “X”, ramai memperbincangkan dugaan perselingkuhan yang melibatkan Azizah Salsha, istri pesepak bola Pratama Arhan, dengan Salim Nauderer, mantan kekasih selebgram Rachel Vennya. Isu ini mulai merebak setelah rekaman percakapan antara Arhan dan Rachel tersebar, di mana Arhan diduga membahas perselingkuhan tersebut dengan Rachel. Isu ini mengundang perhatian besar mengingat Azizah adalah putri dari politikus Andre Rosiade. Andre Rosiade, sebagai tokoh politik berpengaruh, diduga memainkan peran dalam meredam skandal ini dengan cepat, sehingga berita mengenai masalah pribadi putrinya tidak

terlalu berkembang luas di media. Meskipun begitu, kasus ini tetap memicu perdebatan publik tentang penggunaan pengaruh politik dalam menyelesaikan isu-isu pribadi.

Selain itu, kasus Basuki Cahaya Purnama (Ahok) adalah salah satu contoh paling terkenal dari *cancel culture* di Indonesia, meskipun juga melibatkan aspek hukum yang lebih besar. Pada tahun 2016, Ahok, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, menghadapi reaksi publik yang besar setelah pernyataannya mengenai Al-Qur'an (Surat Al-Maidah) dianggap menyinggung umat Islam. Protes besar-besaran terjadi di seluruh negeri, dan banyak yang menyerukan agar dia mundur dari jabatannya. Ahok kemudian menghadapi pengadilan dan dihukum penjara atas tuduhan penistaan agama. Kasus ini menggambarkan bagaimana tekanan publik melalui media sosial dan demonstrasi massa dapat berujung pada *cancel culture* yang memiliki konsekuensi hukum dan politik yang signifikan.

Ketiga contoh ini mencerminkan bagaimana platform "X" di Indonesia bukan hanya sekadar media sosial, tetapi juga berfungsi sebagai arena public sphere di mana isu-isu sosial dan moral diperdebatkan secara terbuka, meskipun kadang dengan nuansa penghakiman yang berlebihan.

Dampak Fenomena *Cancel Culture*

Fenomena *cancel culture* telah menjadi isu yang semakin mendominasi diskusi di media sosial, terutama di platform "X". Dampak dari fenomena ini dapat sangat signifikan dan kompleks, mempengaruhi individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan (Islahuddyn 2023). Salah satu dampak paling mencolok dari *cancel culture* adalah pengaruhnya terhadap kesehatan mental individu. Banyak orang yang mengalami *cancel culture* melaporkan peningkatan kecemasan, depresi, dan bahkan rasa kesepian. Penelitian menunjukkan bahwa tekanan sosial yang ditimbulkan oleh tindakan membatalkan dapat memicu perasaan terisolasi dan tidak berdaya, yang pada akhirnya mengarah pada gangguan mental yang serius. Dampak terjadinya *cancel culture* menyebabkan banyak orang yang akhirnya terkucilkan dalam kehidupan sehari-hari mereka (Supriadi 2017).

Cancel culture sering kali berujung pada hilangnya karier dan reputasi bagi individu yang dibatalkan. Selebriti, influencer, dan tokoh publik lainnya dapat kehilangan kontrak kerja, penggemar, dan dukungan finansial dalam waktu singkat. Contohnya adalah Gofar Hilman di Indonesia, yang kehilangan pekerjaan setelah tuduhan pelecehan seksual muncul (Anon n.d.). Dampak ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga dapat menghancurkan reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Fenomena *cancel culture* juga menyebabkan peningkatan kehati-hatian dalam berkomunikasi di media sosial. Banyak pengguna menjadi lebih selektif dalam mengekspresikan pendapat mereka, menghindari topik-topik kontroversial untuk menghindari risiko dibatalkan. Hal ini menciptakan suasana di mana hanya suara mayoritas yang terdengar, sementara pandangan minoritas sering kali terpinggirkan.

Praktik *cancel culture* sering kali menyerupai *bullying online*, di mana individu atau kelompok diserang secara berlebihan tanpa kesempatan untuk membela diri. Ini

menciptakan lingkungan yang toxic dan penuh ketakutan di mana orang merasa tertekan untuk berbicara atau berpartisipasi dalam diskusi. Dalam banyak kasus, korban *cancel culture* tidak diberikan ruang untuk meminta maaf atau menjelaskan tindakan mereka.

Cancel culture juga mempengaruhi dinamika sosial dalam komunitas online. Ketika seseorang dibatalkan, hal ini dapat menciptakan polarisasi di antara anggota komunitas. Beberapa mendukung tindakan pembatalan tersebut, sementara yang lain merasa bahwa tindakan tersebut berlebihan. Ketegangan ini dapat merusak hubungan antar individu dan menciptakan perpecahan dalam komunitas.

Di sisi positifnya, *cancel culture* kadang-kadang dapat meningkatkan kesadaran sosial tentang isu-isu penting seperti ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif. Tindakan membatalkan bisa menjadi cara bagi masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban dari individu atau organisasi yang dianggap melanggar norma sosial. Namun, penting untuk memastikan bahwa tindakan ini tidak dilakukan dengan cara yang merugikan (Purnamasari 2022).

Cancel culture juga dapat membuka kembali luka lama bagi individu yang pernah mengalami trauma atau masalah pribadi. Ketika seseorang dibatalkan karena kesalahan masa lalu, mereka harus menghadapi kembali pengalaman menyakitkan tersebut di depan publik. Ini dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius dan memperburuk kondisi mental mereka.

KESIMPULAN

Platform “X” kini berfungsi sebagai ruang digital di mana pengguna dapat memberikan sanksi sosial terhadap individu atau organisasi yang dianggap melanggar norma sosial. Dengan dukungan hashtag, retweet, dan komentar, tindakan *cancel culture* sering kali menyebar secara viral, menjadikan media sosial sebagai alat kuat untuk penghakiman publik. Bagi individu, *cancel culture* sering kali menyebabkan penurunan kesehatan mental, hilangnya reputasi, dan bahkan kehancuran karier. Di sisi lain, fenomena ini juga menciptakan polarisasi dalam komunitas, memperkuat fragmentasi dan echo chamber, di mana suara-suara yang mendominasi cenderung memperkuat pandangan mereka sendiri.

REFERENSI ATAU DAFTAR PUSTAKA (bukan bibliografi)

Anon. 2023. “Fenomena Cancel Culture Di Twitter Ditinjau Dari Teori Public Sphere Jürgen Habermas Skripsi Disusun Guna Mencapai Gelar Sarjana Di Bidang Ilmu Filsafat Oleh : Riski Islahuddyn.”

Anon. n.d. “Fenomena Cancel Culture Dan Dampaknya Yang Menakutkan.”

GCFLearn. 2019. “Digital Media Literacy: What Is an Echo Chamber?”

- Henderson, Morag. 2019. “The Quarter-Life Crisis? Precarious Labour Market Status and Mental Health among 25-Year-Old in England.” *Longitudinal and Life Course Studies* 10(2):259–76.
- Islahuddyn, Riski. 2023. “Fenomena Cancel Culture Di Twitter Ditinjau Dari Teori Public Sphere Jürgen Habermas.”
- Lola Edria, Ade, Elsa Fitria Anwar, Wilda Okta, Dwina Deti, Hasan Sazali, and Maulana Andinata. 2023. “Fenomena Cancel Culture Oleh Pengguna Twitter Dalam Unggahan Akun @Areajulid.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober* 9(20):11–20.
- Muhammad Alzaki Tristi, Wigke Capri. 2023. “Cancel Culture, Bola Api Liar Kebebasan Bersuara Di Era Virtual.”
- Purnamasari, Novita Ika. 2022. “Cancel Culture: Dilema Ruang Publik Dan Kuasa Netizen.” *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi* 6(2):137–49. doi: 10.35760/mkm.2022.v6i2.7719.
- Roseline, Roseline, Julius Julius, Laura Christie Abigail Boseke, and Setika Sidhik Nurhidayat. 2023. “Cancel Culture Di Twitter: Etnografi Virtual Kasus Gofar Hilman Dan Radio Prambors Di Akun @Prambors.” *Cakrawala - Jurnal Humaniora* 23(1):10–15. doi: 10.31294/jc.v23i1.13848.
- Supriadi, Yadi. 2017. “Relasi Ruang Publik Dan Pers Menurut Habermas.” *Jurnal Kajian Jurnalisme* 1(1):1–20. doi: 10.24198/kj.v1i1.12228.
- Waani, Maxin Sydney, and J. A. Wempi. 2021. “Cancel Culture as a New Social Movement.” *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* 5(7):266–70.
- Yanuar, Deni, Nadia Muharman, Mhd Yudha Teguh Pratama Yudha, Rahmawati Rahmawati, Nur Anisah Anisah, and Maini Sartika Maini. 2023. “Cancel Culture Sebagai Bentuk Kontrol Sosial Di Twitter.” *Jurnal Media Dan Komunikasi* 3(2):120–35. doi: 10.20473/medkom.v3i2.44044.